

**KERJASAMA LINTAS BATAS NEGARA PADA
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF DALAM RANGKA PENGELOLAAN
SUMBER DAYA IKAN YANG BERKELANJUTAN**

ABSTRAK

Indonesia yang memiliki Zona Ekonomi yang sanga luas mencoba untuk mengelola sumber daya ikan agar tetap lestari menghadapi masalah yaitu praktik Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) yang sebagian besar dilakukan oleh kapal ikan asing (KIA) berbendera negara tetangga. Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan kerjasama lintas batas negara pada pengelolaan SDI pada ZEE Indonesia, membandingkan pengaturan kerjasama lintas batas negara pada pengelolaan sumber daya ikan pada ZEE dalam hukum Australia, dan Filipina dan menemukan model kerjasama lintas batas negara yang dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan yang dapat membantu memberantas terjadinya IUUF pada ZEE Indonesia. Disertasi ini dikaji dengan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan normative, perbandingan hukum serta yuridis filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sudah mengatur kerjasama lintas batas negara dalam pengelolaan SDI di ZEE namun Indonesia belum ada kerjasama khusus untuk tujuan itu. Kerjasama yang ada sebagian besar mengarah pada pemberantasan IUUF namun tidak terimplementasi dengan baik karena substansi kerjasama terlalu luas, wilayah perairan yang menjadi lokasi kerjasama tidak jelas, mayoritas kerjasama berbentuk MOU, LOI maupun Komunike Bersama merupakan bentuk perjanjian internasional yang paling lemah dan tidak dapat mengikat para pihak sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat dan tidak dapat memberikan kepastian hukum. Hukum Australia dan hukum Filipina mengatur tentang kerjasama lintas batas negara. Australia telah mengimplementasikannya dengan baik dengan Papua New Guinea namun bukan di wilayah ZEE. Sedangkan Filipina mirip dengan Indonesia yaitu belum memiliki kerjasama demikian karena masih tumpang tindih wilayah ZEE dengan negara tetangga. Kerjasama pengelolaan SDI di ZEE antara Rusia dan Norwegia serta antara Cina dan Jepang sangat implementatif karena substansinya jelas dan mensyaratkan ratifikasi. Indonesia dapat mengadopsi kerjasama yang dilakukan Rusia-Norwegia, Cina-Jepang dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat nelayan Indonesia, kerjasama dibuat dalam bentuk *treaty* dan mensyaratkan ratifikasi oleh para pihak dalam hukum nasionalnya, substansinya paling tidak meliputi ketentuan tentang tanggung jawab negara, penetapan wilayah pengelolaan bersama, pembentukan komisi bersama, penelitian ilmiah, waktu tangkap/panen, alat tangkap, jenis ikan yang boleh ditangkap, kuota, pengawasan dan penyelesaian sengketa.

Kata Kunci:

Kerjasama Lintas Batas Negara; Zona Ekonomi Eksklusif; Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Berkelanjutan.

**STATE TRANS BORDER COOPERATION
ON EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE IN MANAGING FISHERY RESOURCES
SUSTAINABILITY**

ABSTRACT

Indonesia, which has a very wide economic zone, tries to manage fish resources in a sustainable manner, facing problems, namely the practice of Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUUF) which is mostly carried out by foreign fishing vessels (KIA) with neighboring countries' flags. This study aims to analyze and criticize trans-border cooperation arrangements in the management of fishery resources in Indonesia's EEZ, compare trans-border cooperation arrangements in the management of fish resources in the EEZ in the laws of Australia, and the Philippines and several other countries and find out a model of trans-border cooperation that can be developed and implemented in sustainable management of fish resources which can help eradicate the occurrence of IUUF in Indonesia's EEZ. This Dissertation was studied by normative research using approaches of normative, legal comparative and philosophical juridical. The results of the study show that Indonesia has arranged trans-border cooperation in the management of fish resources in the EEZ, but Indonesia has not had yet specific cooperation for that purpose. Most of the governing cooperation leads to the eradication of IUUF yet they are not implemented properly because the substance of the cooperation is too broad, the territorial waters where the cooperation is located is unclear, the majority of cooperation is in the form of MOU, LOI and Joint Communiqué which is the weakest form of international agreement and cannot bind the parties so that it cannot be used as a strong legal basis and cannot provide legal certainty. Australian law and Philippine law also regulate state trans-border cooperation. Australia has implemented it well with Papua New Guinea but not on the EEZ. Meanwhile, the Philippines is similar to Indonesia, that it hasn't had yet such cooperation because the EEZ area still overlaps with neighboring countries. Cooperation in the management of fish resources in the EEZ between Russia and Norway as well as between China and Japan is very implementable because the substance is clear and requires ratification. Indonesia is able to adopt the cooperation carried out by Russia-Norway, China-Japan and the local wisdom values of the Indonesian fishing community, the cooperation is in the form of a treaty and requires for ratification by the parties in its respective national law, the substance at least includes provisions regarding state responsibility, stipulation of joint management area, establishment of joint commissions, scientific research team, harvest period, fishing gear, types of fish that may be caught, quotas, supervision and dispute resolution.

Keywords:

State trans border cooperation; Exclusive Economic Zone; Fisheries resources management; Sustainability.